

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



RENJA

INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025



**Jalan Gunung Agung No. 4
Telp/Fax : 0621-21757
Email : itkotebingtinggi@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun Renja SKPD setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 356 berbunyi bahwa Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Inspektorat Kota Tebing Tinggi menyampaikan Rancangan Renja Inspektorat tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Rancangan Renja ini kami sampaikan kiranya dapat memberi kontribusi yang berarti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Desember 2024
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 3 |
| BAB II | |
| HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 4 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 4 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 8 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD | 11 |
| BAB III | |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 16 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 16 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 17 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 17 |
| BAB IV | |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 23 |
| BAB V | |
| PENUTUP | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 ini merupakan acuan bagi seluruh aparatur Inspektorat Kota Tebing Tinggi selama tahun rencana kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.
2. Meningkatkan tingkat akuntabilitas tata kelola pemerintah dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan teknologi Informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, etika dan moralitas agar dapat mandiri dan profesional melaksanakan tugas pengawasan.

Ketiga agenda tersebut merupakan dasar utama untuk mencapai tujuan strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi di mana ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan dan dilaksanakan secara komprehensif dan bersamaan, baik dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang strategis maupun mendesak.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2022 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
- k. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
- b. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada dasarnya pembuatan Renja Tahun 2025 ini merupakan piranti untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, melalui penyajian data yang transparan tentang rancangan rencana kerja suatu organisasi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2025.

Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut maka penyajian Renja Tahun 2025 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan mengacu pada pencapaian Renja perangkat daerah pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya agar menjadi perbandingan bagi penyusunan Renja perangkat daerah tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026) | | Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------|--|----|---|----|---|-------|---------|------|--|----|--|-----------------|-----------|---------|-----------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(8+7+9) | | 11=(10/4) | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Persentase OPD tertib Administrasi keuangan | 48 | bulan | 40.382.005.881 | | | | | | | | | 12 | bulan | Rp7.521.338.274 | 12 | bulan | | | | | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 96 | Laporan | 65.662.304 | | | | | | | | | 24 | Laporan | Rp12.498.530 | 24 | Laporan | 440.500 | | | | |
| 6.01.01.2.01.06 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | Dokumen | 37.289.000 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 48 | bulan | 65.662.304 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 0 | 0 | 440.500 | 0,67% | | | |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 48 | Dokumen | 29.132.611.330 | | | | | | 0 | | | 12 | Dokumen | Rp5.545.263.902 | 12 | Dokumen | | | | | |
| 6.01.01.2.03.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 48 | bulan | 29.132.611.330 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp5.545.263.902 | 12 | bulan | 5.343.504.436 | 18,34% |
| 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 48 | Dokumen | 139.122.088 | | | | | | 0 | | | 12 | Dokumen | Rp26.481.275 | 12 | Dokumen | | | | | |
| 6.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4 | Tahun | 139.122.088 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1,25 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 1 | Tahun | Rp26.481.275 | 1 | Tahun | 20.765.175 | 14,93% |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 48 | Dokumen | 1.515.454.804 | | | | | | 0 | | | 12 | Dokumen | Rp228.693.577 | 12 | Dokumen | | | | | |
| 6.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 120 | Paket | 99.660.000 | 1 | Tahun | | | | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya kualitas SDM | 48 | bulan | 1.515.454.804 | 15 | Kgt | - | 6 | Kgt | 0 | 15 | Kgt | 15 | Kgt | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp228.693.577 | 12 | bulan | 1.142.056.705 | 75,36% |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 60 | Dokumen | 3.711.543.662 | | | | | | 0 | | | 60 | Dokumen | Rp706.475.944 | 60 | Dokumen | | | | | |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4 | Tahun | 99.374.516 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | 12 | Bln | *DIV/0! | 1 | Tahun | Rp18.915.500 | 1 | Tahun | 12.032.900 | 12,13% |
| 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 48 | bulan | 152.109.349 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | 12 | Bln | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp28.953.343 | 12 | bulan | 21.954.500 | 14,43% |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 48 | bulan | 839.694.325 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | 12 | Bln | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp159.832.106 | 12 | bulan | 87.707.500 | 10,45% |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan | 48 | bulan | 708.839.485 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | 12 | Bln | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp134.924.465 | 12 | bulan | 66.787.000 | 9,42% |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 | bulan | 1.911.525.986 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | 12 | Bln | *DIV/0! | 12 | bulan | Rp363.850.529 | 12 | bulan | 753.879.041 | 39,44% |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 4 | Tahun | 1.549.073.384 | | | | | | 0 | | | 1 | Tahun | Rp237.268.346 | 1 | Tahun | | | | | |
| 6.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 | Tahun | 616.040.000 | 1 | Unit | - | | | 0 | 1 | Unit | 1 | Unit | *DIV/0! | - | 0 | - | 288.450.000 | 46,82% | | |
| 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 4 | Tahun | 374.938.825 | 1 | Tahun | - | 0 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 1 | Tahun | Rp57.428.599 | 1 | Tahun | 136.300.000 | 36,35% |
| 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Mebel Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 | Tahun | 1.174.135.559 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | *DIV/0! | 1 | Tahun | Rp179.839.747 | 1 | Tahun | 356.678.000 | 30,38% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026) | | Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---------|--|----|---|----|---|-------|---------|----|--|----|--|---------|-----------------|----|---------|-------------|--------|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9) | | 11=(10/4) | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 48 | bulan | 1.338.778.560 | | | - | | | 0 | | | | 12 | bulan | Rp257.216.763 | 12 | bulan | | |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 48 | bulan | 118.067.974 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | | 12 | bulan | Rp13.439.159 | 12 | bulan | 1.500.000 | 1,27% |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48 | bulan | 646.978.026 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | | 12 | bulan | Rp123.149.410 | 12 | bulan | 95.452.327 | 14,75% |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 48 | bulan | 633.732.559 | 12 | Bln | - | 6 | Bln | 0 | 12 | Bln | | 12 | bulan | Rp120.628.194 | 12 | bulan | 98.681.670 | 15,57% |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 4 | Tahun | 2.929.759.748 | | | - | | | 0 | | | | 1 | Tahun | Rp507.439.937 | 1 | Tahun | | |
| 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 | Tahun | 1.484.591.742 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | | 1 | Tahun | Rp257.134.101 | 1 | Tahun | 55.259.100 | 3,72% |
| 6.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 | Tahun | 491.617.897 | 1 | Tahun | - | 6 | Bln | 0 | 1 | Tahun | | 1 | Tahun | Rp85.149.151 | 1 | Tahun | 3.150.000 | 0,64% |
| 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4 | Tahun | 953.550.109 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | | 1 | Tahun | Rp165.156.685 | 1 | Tahun | 199.575.000 | 20,93% |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | 97 | Persen | 14.195.141.220 | | | - | | | 0 | | | | 0,97 | | Rp2.612.243.970 | 1 | | | |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | 372 | Laporan | 9.708.672.706 | | | - | | | 0 | | | | 93 | Laporan | Rp1.786.626.941 | 93 | Laporan | | |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 40 | Laporan | 1.937.972.291 | 12 | Kgt | - | 5 | Kgt | 0 | 12 | Kgt | | 10 | Laporan | Rp356.633.045 | 10 | Laporan | 63.200.000 | 3,26% |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 80 | Laporan | 3.875.944.582 | 32 | Obrik | - | 6 | Obrik | 0 | 32 | Obrik | | 20 | Laporan | Rp713.266.089 | 20 | Laporan | 430.750.000 | 11,11% |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Terlaksananya penelaahan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 128 | Laporan | 465.113.350 | 1 | Kgt | - | 3 | Kgt | 0 | 1 | Kgt | | 32 | Laporan | Rp85.591.931 | 32 | Laporan | 154.805.000 | 33,28% |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya penelaahan atas Laporan Keuangan, RKA, RKPD, RPJMD, dan Penyerapan Anggaran Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 60 | Laporan | 1.162.783.375 | 23 | Kgt | - | 8 | Kgt | 0 | 23 | Kgt | | 15 | Laporan | Rp213.979.827 | 15 | Laporan | 198.138.000 | 17,04% |
| 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Terlaksananya Pengawasan Desa | 20 | Laporan | 387.594.458 | 0 | Bln | - | 0 | Bln | 0 | 0 | Bln | | 5 | Laporan | Rp71.326.609 | 5 | Laporan | 16.575.000 | 4,28% |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Terlaksananya Pengawasan Internal | 28 | Laporan | 808.392.842 | 1 | Kgt | - | 1 | Kgt | 0 | 1 | Kgt | | 7 | Laporan | Rp148.763.531 | 7 | Laporan | 22.350.000 | 2,76% |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026) | | Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|------------------|--|----|---|----|----|-------|---------|------|--|----|--|---------|-----------|------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9) | | 11=(10/4) | | | | | | | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 16 | Laporan | 1.070.871.809 | 4 | Kgt | - | 1 | Kgt | 0 | 4 | Kgt | 0 | 12 | Kgt | #DIV/0! | 4 | Laporan | Rp197.065.910 | 4 | Laporan | 80.745.000 | 7,54% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | 416 | Laporan | 4.486.468.514 | | | - | | | 0 | | | | | | | 41 | Laporan | Rp825.617.029 | 41 | Laporan | | |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 4 | Laporan | 1.385.712.850 | 1 | Tahun | - | 0 | Tahun | 0 | 1,25 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | #DIV/0! | 1 | Laporan | Rp255.004.158 | 1 | Laporan | 88.160.000 | 6,36% |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 160 | Laporan | 3.100.755.664 | 41 | Kasus | - | 22 | Kasus | 0 | 41 | Kasus | 0 | 50 | Kasus | #DIV/0! | 40 | Laporan | Rp570.612.871 | 40 | Laporan | 316.350.000 | 10,20% |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | 97 | Persen | 1.997.905.600 | | | - | | | 0 | | | | | | | 0,97 | | Rp424.762.000 | 1 | | | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | 4 | Laporan | 88.112.946 | | | - | | | 0 | | | | | | | 1 | Laporan | Rp18.733.133 | 1 | Laporan | | |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 4 | Rekomendasi | 90.071.600 | 4 | Kgt | - | 0 | Tahun | 0 | 4 | Kgt | 4 | Kgt | #DIV/0! | 1 | Rekomendasi | Rp22.517.900 | 1 | Rekomendasi | 29.014.000 | 32,21% | |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 4 | Laporan | 88.112.946 | 1 | Tahun | - | 0 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | #DIV/0! | 1 | Laporan | Rp18.733.133 | 1 | Laporan | 100.236.000 | 113,76% | |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | 40 | Laporan | 1.909.792.654 | | | - | | | 0 | | | | | | | 10 | Laporan | Rp406.028.867 | 10 | Laporan | | |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 20 | Kegiatan | 872.972.826 | 1 | Kgt | - | 1 | Kgt | 0 | 1 | Kgt | 1 | Kgt | #DIV/0! | 5 | Kegiatan | Rp185.597.199 | 5 | Kegiatan | 91.416.541 | 10,47% | |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 16 | Laporan | 255.894.324 | 1 | Tahun | - | 1 | Tahun | 0 | 1 | Tahun | 1 | Tahun | #DIV/0! | 4 | Laporan | Rp54.404.064 | 4 | Laporan | 24.882.523 | 9,72% | |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 | Laporan | 780.925.505 | 2 | Kgt | - | 0 | Kgt | 0 | 2 | Kgt | 2 | Kgt | #DIV/0! | 1 | Laporan | Rp166.027.604 | 1 | Laporan | 16.569.000 | 2,12% | |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 40 | Perangkat Daerah | 101.640.000 | 0 | Kgt | - | 0 | Kgt | 0 | 0 | Kgt | 1 | Kgt | #DIV/0! | 10 | Perangkat Daerah | Rp25.410.000 | 10 | Perangkat Daerah | 145.838.500 | 143,49% | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terhadap tujuan, sasaran, serta indikator

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI AWAL TAHUN 2023 | TARGET TAHUN | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | 94% | 94% | 95% | 95% | 97% |
| | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B | 90% | 93% | 95% | 97% | 100% |
| Meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pengawasan | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 |
| | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 |

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Renstra Inspektorat tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

| INDIKATOR KINERJA | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|----------|---------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | 94% | 95% | 95% | 97% | 96,1% | 95% | 97% | |
| Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Persentase penyelesaian kasus pengaduan | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B | 93% | 95% | 97% | 100% | 100% | 97% | 100% | |
| Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | |
| Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | |

Secara umum, tren Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan sejak Tahun 2023. 4 (empat) indikator mengalami peningkatan hingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu:

a. Faktor Pendorong:

- Mekanisme kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan, auditor dan staf Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya kerja sama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah obrik yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran Inspektorat sebagai organisasi utama dari Kepala Daerah dalam hal pengawasan semakin mendapat dukungan. Salah satu tugas besar Inspektorat saat ini adalah penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerahnya melalui MoU antara APH dan APIP, Inspektorat dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penentuan pelanggaran yang ditemui dalam kasus-kasus dugaan korupsi yang ada. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, Inspektorat merupakan salah satu *leading sector* dalam hal pembinaan Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Demikian halnya juga dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan dari pusat seperti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, dimana Inspektorat merupakan asesor tingkat kota dengan mengedepankan *profesional judgment* dalam setiap penilaiannya. Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Tahun 2023, Kota Tebing Tinggi mendapatkan WTP, akuntabilitas pengelolaan

keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan sudah ada peningkatan (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2023 = B, hasil evaluasi dari Kemenpan RB), tantangan ke depan terhadap SAKIP Kota Tebing Tinggi adalah bagaimana untuk meningkatkannya;
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah dilaksanakan dengan optimal karena Kepala Perangkat Daerah sudah terbiasa dengan pengendalian risiko yang ada di lingkungan unit kerjanya;
- d. Memastikan Kapabilitas APIP sampai saat ini sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP;
- e. Menambah Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur Pengawas dengan memperbanyak jumlah Diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya beberapa kebijakan yang datang dari pusat, maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi juga harus menyesuaikan Program dan Kegiatannya untuk memenuhi tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyesuaian yang dilakukan tentunya bukan hanya penambahan anggaran semata, akan tetapi harus melalui perhitungan, analisis dan survei. Dengan adanya penambahan kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka perlu koordinasi dengan instansi pusat yang menugaskannya, menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghitung kembali kebutuhan-kebutuhan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal dan menghasilkan output yang baik.

Dengan adanya penambahan kegiatan, tentunya pasti menambah volume pekerjaan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan kembali kebutuhan pegawai khususnya aparatur pengawas agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya dari segi kuantitas, kualitas SDM Aparatur juga perlu diperhatikan dengan cara menganalisis kebutuhan untuk Diklat pegawai dan Pelatihan Kantor Sendiri.

Perencanaan yang baik juga harus memastikan kegiatan yang berjalan didukung dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu, selain dari kegiatan inti pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi, perlu juga dihitung kembali setiap kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan inti agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kendala yang berarti.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----------|--|------------------|---|----------------|----------------------|--|------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Tersedianya Kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 1 Tahun | 9.055.489.460 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Tersedianya Kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 1 Tahun | 11.288.829.460 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | T. Tinggi | Jumlah Bulanan Penyelesaian Laporan | 12 bulan | 11.386.400 | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | T. Tinggi | Jumlah Bulanan Penyelesaian Laporan | 12 bulan | 11.386.400 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah Bulanan Ketersediaan Penghasilan ASN | 12 bulan | 5.964.295.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah Bulanan Ketersediaan Penghasilan ASN | 12 bulan | 7.331.880.000 | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah Ketersediaan Pakaian dinas dan diklat ASN | 1 tahun | 1.084.990.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah Ketersediaan Pakaian dinas dan diklat ASN | 1 tahun | 1.757.690.000 | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah penyediaan komponen listrik, perlengkapan kantor, bahan | 12 bulan | 787.106.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | T. Tinggi | Jumlah penyediaan komponen listrik, perlengkapan kantor, bahan | 12 bulan | 900.974.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|------------------|----------------------|---|------------------|--|------------------|----------------------|--|
| | | | logistic, cetakan, dan perjalanan dinas | | | | | logistic, cetakan, dan perjalanan dinas | | | |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | T. Tinggi | Pengadaan kebutuhan meubiler, dan peralatan kantor | 1 tahun | 679.383.300 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | T. Tinggi | Pengadaan kebutuhan meubiler, dan peralatan kantor | 1 tahun | 734.070.300 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Ketersediaan surat menyurat, ketersediaan jasa komunikasi dan listrik, ketersediaan jasa pegawai | 1 tahun | 195.402.760 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Ketersediaan surat menyurat, ketersediaan jasa komunikasi dan listrik, ketersediaan jasa pegawai | 1 tahun | 195.402.760 | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung peralatan, kantor, | 1 tahun | 332.926.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | T. Tinggi | Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung peralatan, kantor, | 1 tahun | 334.926.000 | |
| II | Program Penyelenggaraan Pengawasan | T. Tinggi | Persentase Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti | 97 Persen | 1.794.349.000 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | T. Tinggi | Persentase Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti | 97 Persen | 2.528.486.000 | |
| 1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | T. Tinggi | Terlaksananya Pengawasan kinerja, keuangan, reviw laporan kinerja, review laporan | 1 tahun | 1.322.968.000 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | T. Tinggi | Terlaksananya Pengawasan kinerja, keuangan, reviw laporan kinerja, review laporan | 1 tahun | 1.814.968.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|------------------|-------------|---|------------------|---|------------------|---------------|--|
| | | | keuangan, pengawasan desa, Kerjasama pengawasan desa, Kerjasama pengawasan internal, monev tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP | | | | | keuangan, pengawasan desa, Kerjasama pengawasan desa, Kerjasama pengawasan internal, monev tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP | | | |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | T. Tinggi | Terlaksananya penyelesaian kerugian negara, dan pengawasan dengan tujuan tertentu | 1 tahun | 471.381.000 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | T. Tinggi | Terlaksananya penyelesaian kerugian negara, dan pengawasan dengan tujuan tertentu | 1 tahun | 713.518.000 | |
| III | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | T. Tinggi | Persentase Hasil Pembinaan Internal Yang dilaksanakan | 97 Persen | 805.785.000 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | T. Tinggi | Persentase Hasil Pembinaan Internal Yang dilaksanakan | 97 Persen | 1.071.452.000 | |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | T. Tinggi | Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1 Laporan | 96.392.800 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | T. Tinggi | Jumlah kegiatan penilaian kapabilitas APIP | | 150.914.800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|---|------------|-----------------------|----------------------------|--|---|--|-------------|-----------------------|
| 2 | Pendampingan dan Asistensi | T. Tinggi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 10 Laporan | 709.392.200 | Pendampingan dan Asistensi | | Terlaksananya kegiatan pendampingan asistensi, RB, pemberantasan korupsi, dan SPI KPK | | 920.537.200 | |
| | | | | | 11.655.623.460 | | | | | | 14.888.767.460 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap akhir dari RKP tahun 2005-2025.

Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2025 mengambil tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan delapan agenda prioritas nasional, antara lain :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Kemananan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Genezrasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan tolerasni antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

32. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas rumusan isu-isu penting terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam bidang pengawasan dan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengoptimalan Reformasi Birokrasi | Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP | BB |
| | | Opini BPK terhadap LKPD | WTP |

33. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Adapun program/kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 | |

Organisasi : INSPEKTORAT

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Tahun - 1 | Jumlah | | | | Tahun + 1 | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Tahun N |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | |
| 6 01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | |
| 6 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | Rp. 2.528.486.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 2.528.486.000,00 | Rp. 2.505.954.550,00 |
| 6 01 02 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | Rp. 1.814.968.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.814.968.000,00 | Rp. 1.734.569.100,00 |
| 6 01 02 2.01 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 216.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 216.000.000,00 | Rp. 165.000.000,00 |
| 6 01 02 2.01 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 690.990.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 690.990.000,00 | Rp. 660.000.000,00 |
| 6 01 02 2.01 0003 | Reviu Laporan Kinerja | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 255.989.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 255.989.000,00 | Rp. 116.600.000,00 |
| 6 01 02 2.01 0004 | Reviu Laporan Keuangan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 360.990.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 360.990.000,00 | Rp. 330.000.000,00 |
| 6 01 02 2.01 0005 | Pengawasan Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 60.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 60.000.000,00 | Rp. 66.000.000,00 |

| Kode | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | Tahun + 1 |
|------|----|----|------|---|-------------------------|---|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 6 | 01 | 02 | 0006 | Keaja Sama Pengawasan Internal | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 100.600.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.600.000,00 | Rp. 198.028.600,00 |
| 6 | 01 | 02 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 130.399.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 130.399.000,00 | Rp. 198.940.500,00 |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | Rp. 713.518.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 713.518.000,00 | Rp. 771.385.450,00 |
| 6 | 01 | 02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 165.518.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 165.518.000,00 | Rp. 249.985.450,00 |
| 6 | 01 | 02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 548.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 548.000.000,00 | Rp. 521.400.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | | PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | Rp. 1.071.452.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.071.452.000,00 | Rp. 525.156.940,00 |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | | | Rp. 150.914.800,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 150.914.800,00 | Rp. 50.146.690,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 31.877.800,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 31.877.800,00 | Rp. 24.769.690,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 119.037.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 119.037.000,00 | Rp. 25.377.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | Rp. 920.537.200,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 920.537.200,00 | Rp. 475.010.250,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 251.378.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 251.378.400,00 | Rp. 227.995.460,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 196.282.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 196.282.000,00 | Rp. 66.000.000,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 397.810.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 397.810.000,00 | Rp. 146.580.500,00 |
| 6 | 01 | 03 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa | Rp. 75.066.800,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 75.066.800,00 | Rp. 34.434.290,00 |

| Kode | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Tahun - 1 | Jumlah | | | | | Tahun + 1 |
|------|----|----|------|---|-------------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun N | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | |
| 6 | 01 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | Rp. 10.554.759.160,00 | Rp. 734.070.300,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 11.288.829.460,00 | Rp. 10.289.645.070,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp. 11.386.400,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 11.386.400,00 | Rp. 19.782.170,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 11.030.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 11.030.000,00 | Rp. 11.893.300,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 356.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 356.400,00 | Rp. 7.888.870,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Rp. 7.331.880.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 7.331.880.000,00 | Rp. 6.857.755.300,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.331.880.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.331.880.000,00 | Rp. 6.857.755.300,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Rp. 22.500.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 22.500.000,00 | Rp. 16.500.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.03 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 22.500.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 22.500.000,00 | Rp. 16.500.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Rp. 1.757.690.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.757.690.000,00 | Rp. 1.511.796.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 1.757.690.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 1.757.690.000,00 | Rp. 1.511.796.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Rp. 900.974.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 900.974.000,00 | Rp. 942.695.160,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 7.181.700,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.181.700,00 | Rp. 13.331.670,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 20.248.700,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 20.248.700,00 | Rp. 31.663.720,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 135.591.200,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 135.591.200,00 | Rp. 130.381.570,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak | | Rp. 74.231.400,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 74.231.400,00 | Rp. 76.733.800,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | Tahun + 1 | | | | |
|------|--------|-------------|--------|-----------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | | | | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah (Rp) | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 663.721.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 663.721.000,00 | Rp. 690.584.400,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp. 0,00 | Rp. 734.070.300,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 734.070.300,00 | Rp. 548.841.040,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 0 | Rp. 308.020.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 308.020.000,00 | Rp. 338.822.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Tanjung Marulak | Rp. 0 | Rp. 181.039.800,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 181.039.800,00 | Rp. 49.251.730,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Tanjung Marulak | Rp. 0 | Rp. 245.010.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 245.010.500,00 | Rp. 160.767.310,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp. 195.402.760,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 195.402.760,00 | Rp. 260.055.400,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak | | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 15.565.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | Rp. 92.808.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 92.808.000,00 | Rp. 135.088.800,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak | | Rp. 100.094.760,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 100.094.760,00 | Rp. 109.401.600,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp. 334.926.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 334.926.000,00 | Rp. 132.220.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Tanjung Marulak | | Rp. 113.800.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 113.800.000,00 | Rp. 51.920.000,00 |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Tanjung Marulak | | Rp. 22.406.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 22.406.000,00 | Rp. 48.400.000,00 |

| Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | Jumlah | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | | | | | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | Tahun + 1 |
| 6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Alokasi Umum (DAU) | Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan Semua Keli/Desa | | | Rp. 198.720.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 198.720.000,00 | Rp. 31.900.000,00 |
| | | | Jumlah | | | Rp. 14.154.697.160,00 | Rp. 734.070.300,00 | | | Rp. 14.888.767.460,00 | Rp. 13.320.756.560,00 |

Kota Tebing Tinggi.....
Inspektur

H. KAMLAN, S.H., MM., CGCAE.
NIP. 196506031986021004

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1 Rumusan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian kinerja | Kebutuhan dana/Pagu Indikatif | sumber dana |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | | |
| Inspektorat Daerah | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 11.288.829.460 | 1 Tahun | 9.426.306.700 | APBD KOTA |
| Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 11.386.400 | 12 bulan | 17.934.700 | APBD KOTA |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.331.880.000 | 12 bulan | 6.234.323.000 | APBD KOTA |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.757.690.000 | 1 tahun | 1.446.493.000 | APBD KOTA |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 900.974.000 | 12 bulan | 856.995.600 | APBD KOTA |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | 734.070.300 | 1 tahun | 498.946.400 | APBD KOTA |

| | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 195.402.760 | 1 tahun | 236.414.000 | APBD KOTA |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 334.926.000 | 1 tahun | 120.200.000 | APBD KOTA |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | 2.528.486.000 | 97 Persen | 2.278.140.500 | APBD KOTA |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.814.968.000 | 1 tahun | 1.576.881.000 | APBD KOTA |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 713.518.000 | 1 tahun | 701.259.500 | APBD KOTA |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1.071.452.000 | 97 Persen | 477.415.400 | APBD KOTA |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 150.914.800 | 1 tahun | 45.587.900 | APBD KOTA |
| Pendampingan dan Asistensi | 920.537.200 | 1 tahun | 431.827.500 | APBD KOTA |
| JUMLAH | | | 14.888.767.460 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi.

Adapun arah kebijakan pembangunan bidang urusan telah tertuang di dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, berkaitan dengan segala aktivitas dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah maka, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 1% dari total belanja daerah untuk kabupaten/kota yang memiliki Belanja Daerah kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah). Anggaran pengawasan yang dimaksud adalah merupakan kegiatan inti yang ada di Inspektorat seperti pemeriksaan, reuiu, evaluasi, Monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Setiap anggaran pendanaan yang dititipkan kepada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah amanah rakyat dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, untuk itu Inspektorat Kota Tebing Tinggi selalu menggunakan prinsip Efisiensi, Efektif dan kehati-hatian dalam mengelola setiap anggaran yang ada.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 ini, maka diharapkan kerja keras dari seluruh aparatur pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi agar tujuan dan sasaran kinerjanya dapat tercapai dengan baik.

Tebing Tinggi, Desember 2024

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004